



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUPARJI
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 445872

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.310.350.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/140 m2 di KOTA SURABAYA, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 345 m2/180 m2 di SUMENEP, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
3. Tanah Seluas 360 m2 di SUMENEP, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
4. Tanah Seluas 178 m2 di PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 255.000.000
5. Tanah Seluas 1600 m2 di SUMENEP, HASIL SENDIRI Rp. 585.000.000
6. Tanah Seluas 1350 m2 di SUMENEP, HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000
7. Tanah Seluas 280 m2 di PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000
8. Tanah Seluas 8000 m2 di SUMENEP, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
9. Tanah Seluas 15000 m2 di SUMENEP, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
10. Tanah Seluas 1800 m2 di SUMENEP, HASIL SENDIRI Rp. 350.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 317.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000



2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 2.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL
SENDIRI Rp. 5.000.000
4. MOBIL, MITSUBISHI MIRAGE Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000
5. MOBIL, MITSUBISHI MINIBUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
200.000.000
6. LAINNYA, VIAR RODA 3 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	26.550.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	110.023.772
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.763.923.772
III. HUTANG	Rp.	500.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.263.923.772

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.